

Penguatan *Rural Community* Melalui Proses Kolaboratif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia

*** Rijalul Fikri¹, Khairul Rahman², Wan Nor Azilawanie Binti Tun Ismail³, Lenia Devita Sari⁴**

^{1,2,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

³Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia

*Corresponding Author : rijalul.fikri@soc.uir.ac.id

Abstrak

Penabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat desa dapat melakukan penguatan melalui proses kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysi. Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di negara berkembang dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Pengabdian ini mencoba untuk menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan pada tingkat desa dapat dilakukan dengan proses kolaboratif setiap stakeholder. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2024. Metode yang digunakan meliputi beberapa tahapan yakni, tahapan identifikasi masalah, partisipasi mitra dalam program, evaluasi dan keberlanjutan program serta, identifikasi peran dan tugas setiap anggota pengabdian. Dalam pengabdian ini kami menemukan bahwa pengentasan kemiskinan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman perlu menerapkan proses kolaboratif yang lebih dalam dengan melibatkan multi dimensional stakeholder.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, *Rural Community*, Proses Kolaboratif, Pengentasan Kemiskinan

Abstract

This community service aims to see how village communities can strengthen through a collaborative process in alleviating poverty in the State of Terengganu Darul Iman, Malaysia. Poverty is still a major problem in developing countries with various factors causing it. This service tries to explain that poverty alleviation at the village level can be done through a collaborative process for each stakeholder. This research was carried out on October 7 2024. The method used included several stages, namely, problem identification stages, partner participation in the program, program evaluation and desires as well as, identification of the roles and duties of each service member. In this service we found that poverty alleviation in Terengganu Darul Iman State needs to implement a deeper collaborative process involving multidimensional stakeholders.

Keywords: Community Service, *Rural Community*, Collaborative Process, Poverty Alleviation

PENDAHULUAN

Analisis situasi dan permasalahan mitra dimulai dengan melihat kemiskinan sebagai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Meski telah terjadi berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, jutaan orang di seluruh dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga masih ditemukan di negara maju.

Kemiskinan dapat ditelusuri melalui berbagai faktor, antara lain kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang tidak memadai, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Selain itu, konflik dan bencana alam seringkali memperburuk kondisi masyarakat yang sudah rentan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, yang akhirnya mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Sebuah studi di pedesaan Terengganu menemukan bahwa modal sosial memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, bersama dengan modal manusia dan fisik, demografi rumah tangga, dan ukuran rumah tangga (Abdul-Hakim, Abdul-Razak and Ismail, 2010). Peran pemimpin lokal dalam keberhasilan proyek penanggulangan kemiskinan di Terengganu disorot, menekankan pentingnya karakteristik kepemimpinan dan struktur pembangunan masyarakat (Amat Simin, Abdullah and Ibrahim, 2015). Sebuah studi di Kuala Terengganu mengungkapkan bahwa biaya medis langsung menyebabkan sejumlah besar rumah tangga mengalami pengeluaran yang sangat besar dan kemiskinan, terutama yang mempengaruhi masyarakat miskin perkotaan (Loganathan *et al.*, 2015). Kelembagaan ditemukan tidak aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan tepat waktu kepada petani di Kelantan dan Terengganu, sehingga menyebabkan kerentanan terhadap kemiskinan (Abdelhak *et al.*, 2015).

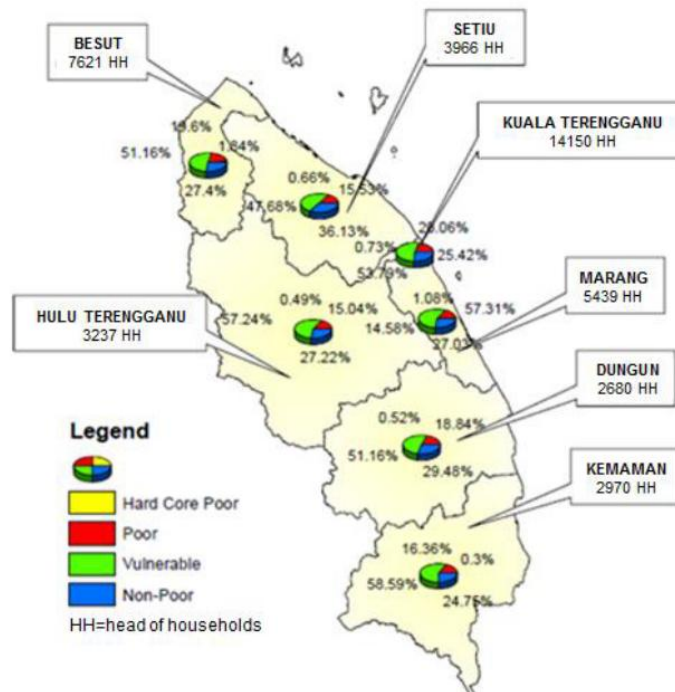


Figure 1 Distribution Of Poverty Status By Districts In Terengganu (Source : (Siwar, 2014))

Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Terengganu, Malaysia, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Zainudin *et al.*,

2019; Mohamad, Mat Desa and Kasim, 2021). Distribusi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar wilayah dan daerah pedesaan - perkotaan di Semenanjung Malaysia , termasuk Terengganu , telah menyebabkan kesenjangan yang lebar dan tingginya angka kemiskinan di daerah - daerah tertentu(Mohamad, Mat Desa and Kasim, 2021). Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan regional Timur - Barat di Malaysia , termasuk Terengganu , dipengaruhi oleh kebijakan yang berpihak pada politik dan etnis , sehingga berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut(Asadullah, Joseph and Chin, 2023).

Pada dasarnya beberapa upaya sudah dilakukan Pemerintah Malaysia untuk mengatasi kemiskinan. Pemerintah Malaysia memiliki berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, namun distribusi bantuan sosial yang efisien terkait dengan kemiskinan di daerah pedesaan merupakan tantangan tersendiri(Tedong *et al.*, 2022). Degradasi lingkungan dan perubahan iklim dapat berdampak pada kemiskinan di Malaysia, mempengaruhi kapasitas produksi pangan dan sistem yang bergantung pada perekonomian(Siong, Ngah and Adeyemi, 2011).

Kebijakan yang berpihak pada etnisitas memainkan peran penting dalam menjelaskan perbedaan regional dalam penanggulangan kemiskinan , dengan etnisitas dan agama mempengaruhi kemajuan program penanggulangan kemiskinan(Asadullah, Joseph and Chin, 2023). Masyarakat adat yang tinggal di wilayah yang sensitif terhadap lingkungan dan tidak terlindungi cenderung lebih miskin , menghadapi kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti perumahan , pendidikan , dan mata pencaharian ekonomi(Kari *et al.*, 2016). Komunitas Orang Asli di Kampung Sungai Berua contohnya bergantung pada sumber daya hutan yang tidak stabil untuk pendapatan , yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi pengeluaran sehari - hari dan tingkat stabilitas keuangan yang rendah(Ab Manaf *et al.*, 2021).

Tujuan pengabdian kepada masyarakat dalam penguatan "Rural Community" melalui proses kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia yakni mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Tujuan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait penguatan "Rural Community" melalui proses kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia adalah membangun dan memperkuat jaringan sosial dan komunitas untuk meningkatkan solidaritas, kerja sama, dan kolaborasi di antara anggota komunitas, serta antara komunitas dengan pihak eksternal.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi inti permasalahan, tindak lanjut permasalahan, dan prioritas permasalahan dalam penguatan "Rural Community" melalui proses kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia, maka tahapan pemecahan masalah yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

- Pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk identifikasi kebutuhan dasar, dimana tahap pertama kegiatan dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion untuk mengidentifikasi faktor kekutan atau faktor pendorong "Rural Community" melalui proses kolaboratif untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia.

- Tahap Kedua, Tim Pengabdian akan melakukan sharing pengetahuan kepada masyarakat khususnya pemerintah atas hasil identifikasi proses kolaboratif yang dapat dilakukan "Rural Community" untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia.
- Tahap selanjutnya, setelah sosialisasi, tim akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemahaman pemerintah desa dan masyarakat dalam mengidentifikasi proses kolaboratif yang dapat dilakukan "Rural Community" untuk dapat mengentaskan kemiskinan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia.

Partisipasi Mitra dalam Program

Partisipasi mitra dalam hal ini adalah Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Sultan Zainal Abadin (UNiSZA) yang akan membantu tim untuk mengkoordinir masyarakat dan pemerintah di salah satu desa pada negara bagian terengganu untuk hadir dalam FGD. Mitra program juga berpartisipasi dengan menyediakan tempat untuk melaksanakan program kemitraan termasuk perijinan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, mitra kegiatan turut berpartisipasi dalam mempublikasikan program di kalangan masyarakat desa di wilayah pedesaan yang direncanakan.

Evaluasi dan Keberlanjutan Program

Tim melakukan evaluasi dalam tiga tahap yaitu evaluasi jangka pendek, jangka menengah, dan evaluasi akhir. Evaluasi jangka pendek dilakukan pada setiap selesainya kegiatan yang dilakukan dengan mitra terkait pelaksanaannya untuk dikoordinasikan bersama dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Evaluasi jangka menengah dilakukan oleh tim sejak awal kegiatan hingga empat bulan berjalannya program. Tim akan melakukan perbaikan dan perubahan metode jika evaluasi menilai kegiatan jauh dari tujuan yang direncanakan. Evaluasi akhir dilakukan oleh tim ketika program kemitraan masyarakat selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kendala dan manfaat kegiatan yang diperoleh akan dilaporkan dalam laporan akhir untuk kesempurnaan pada kegiatan pengabdian selanjutnya. Untuk keberlanjutan program, tim berkomitmen untuk melakukan pendampingan melalui penelitian bersama dengan UUM untuk uji coba konsep di masa yang akan datang.

Peran dan Tugas Anggota PKM

- | | | |
|------------|---|---|
| Ketua | : | Ketua pengabdian masyarakat memiliki tugas untuk mengkoordinasikan presentasi kepada masyarakat dan pemerintah Terengganu Malaysia mengenai pelaksanaan pelibatan masyarakat. |
| Anggota I | : | Anggota pertama bertanggung jawab untuk mempersiapkan kebutuhan yang berkaitan dengan identifikasi masalah kebijakan pendidikan dan memobilisasi masyarakat. |
| Anggota II | : | Anggota kedua bertugas membantu teknis pelaksanaan acara FGD dan juga dokumen-dokumen teknis yang dibutuhkan seperti absensi dan surat menyurat yang dianggap perlu. |
| Student | : | Membantu dalam dokumentasi dan publikasi hasil pelibatan masyarakat. |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam pendekatan kemiskinan yakni melalui penekatan kolaboratif. Prinsip - prinsip Utama Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan Secara Kolaboratif : - Strategi Komprehensif yang mendasari bahwa kemiskinan merupakan masalah yang memiliki banyak sisi yang memerlukan strategi komprehensif untuk mengatasi berbagai dimensinya , dengan menggabungkan intervensi ekonomi , sosial , dan kebijakan(Salamova, Kantemirova and Makazieva, 2023). Upaya kolaboratif antara pemerintah , organisasi , dan masyarakat disorot sebagai hal yang penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan mengatasi akar penyebab kemiskinan(Salamova, Kantemirova and Makazieva, 2023).

Lanskap pembangunan internasional menekankan pada kegiatan kolaboratif dan kemitraan untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan , diperkuat oleh seruan untuk kemitraan global untuk pembangunan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sedang muncul(Schaaf, 2015). Tata kelola kolaboratif ditekankan sebagai suatu proses yang menekankan pertukaran dan kolaborasi antara pemerintah , kelompok sosial , dan warga negara berdasarkan kepentingan bersama , yang mengarah pada kerjasama pembangunan yang efektif (Xiang and Tan, 2019). Teknologi dan media digital digunakan untuk memperluas jangkauan , komunikasi , dan koordinasi dalam program penanggulangan kemiskinan , sehingga meningkatkan partisipasi program dan memperluas promosi melalui strategi penjangkauan kreatif untuk melibatkan anggota masyarakat(Daniel W *et al.*, 2022).

Oleh karena itu, penting kiranya menajajaki Kolaborasi Lintas Sektor dalam Inisiatif Anti-Kemiskinan seperti gambar berikut :



Figure 2 Exploring Cross-sector Collaboration in Anti-Poverty Initiatives: Harnessing the Power of Nonprofit Organizations in Anti-Poverty Initiatives (source: <https://fastercapital.com/>)

Langkah – langkah yang bisa diterapkan dalam menjajaki Kolaborasi Lintas Sektor dalam Inisiatif Anti-Kemiskinan :

1. Mengidentifikasi Peran Organisasi Nirlaba dalam Inisiatif Anti-Kemiskinan
2. Menyediakan Layanan Langsung kepada Individu dan Masyarakat yang Rentan
3. Mengadvokasi Perubahan Kebijakan dan Keadilan Sosial
4. Memobilisasi Sumber Daya dan Membangun Kemitraan
5. Menciptakan solusi yang Inovatif
6. Memperkuat Suara Komunitas yang Terpinggirkan
7. Memanfaatkan Teknologi dan data untuk Dampak

Dari model solusi diatas salah satu bentuk kolaboratif dalam anti kemiskinan melalui pemanfaata teknologi. **Ini sesuai dengan Riset yang penulis lakukan**, dimana Penggunaan e - government dalam pengolahan data kemiskinan untuk bantuan sosial menghadapi kendala terkait kesiapan teknologi dan pengetahuan teknologi(Fikri *et al.*, 2023). Penelitian ini menekankan pentingnya penerimaan dan kompatibilitas teknologi untuk e - government dalam aplikasi data kemiskinan(Fikri *et al.*, 2023).



Figure 3. Pelaksanaan Pengabdian

Secara spesifik gambaran Penggunaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dalam pengentasan kemiskinan secara kolaboratif memberikan peluang untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan. Penulis mengutip sebuah riset yang berjudul “Paths out of poverty: Social entrepreneurship and sustainable development” (Zhang *et*

al., 2022). Dalam riset ini salah satu gambaran pengetahuan dan teknologi yang bisa dilakukan dengan menerapkan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan

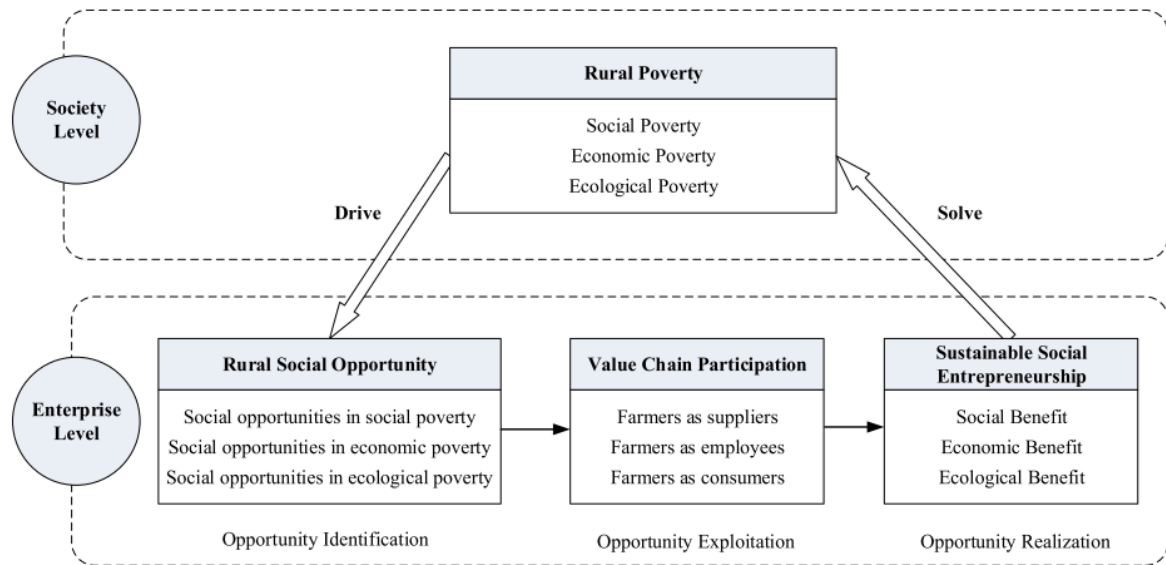


Figure 3 Sustainable development framework for social entrepreneurship.(Zhang et al., 2022)

Riset ini mencoba untuk mengungkapkan mekanisme kewirausahaan sosial untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan, dan mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk pengembangan kewirausahaan sosial yang berkelanjutan dan kolaboratif(Zhang et al., 2022). Riset ini menemukan bahwa kewirausahaan sosial adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mewujudkan peluang sosial, dan nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai ekologi yang diciptakan oleh kewirausahaan sosial sesuai dengan solusi kemiskinan ekonomi, sosial, dan ekologi pedesaan. Ini adalah proses penting dari kewirausahaan sosial yang mempromosikan pembangunan pedesaan. Riset ini juga menemukan peran peluang sosial dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan baik di tingkat sosial maupun perusahaan. Ada tiga jenis peluang sosial yang didorong oleh kemiskinan pedesaan di tingkat sosial, termasuk peluang dalam kemiskinan sosial, ekonomi, dan ekologi. Di tingkat perusahaan, setelah mengidentifikasi peluang sosial, perusahaan melibatkan masyarakat di berbagai bagian rantai nilai mereka untuk mengembangkan dan merealisasikan peluang, yang merupakan cara yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan(Zhang et al., 2022).

SIMPULAN

Program Penguatan Rural Community melalui proses kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia, telah menunjukkan hasil yang positif. Melalui pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, program ini berhasil meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi komunitas pedesaan dengan mengedepankan sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat setempat.Kolaborasi yang dilakukan melibatkan berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan lokal, pengembangan usaha mikro berbasis komunitas, serta pendampingan dalam akses permodalan dan pemasaran. Hasilnya,

terjadi peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, program ini juga memperkuat jejaring sosial dalam komunitas, sehingga meningkatkan solidaritas dan gotong royong dalam upaya bersama mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan program ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan strategi yang efektif dalam pembangunan komunitas berkelanjutan. Sebagai langkah lanjut, disarankan agar program ini terus diperluas dan diperkuat dengan dukungan kebijakan yang lebih sistematis serta pengembangan inovasi berbasis teknologi dan digitalisasi ekonomi. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau serta Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Dan tekhusus pada mitra pengabdian kami yakni Faculty of Applied Social Science, Sultan Zainal Abidin University, Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

Ab Manaf, N. *et al.* (2021) 'Spending habits of the Orang Asli in Kampung Sungai Berua, Hulu Terengganu, Malaysia', in *Resource Use and Sustainability of Orang Asli: Indigenous Communities in Peninsular Malaysia*, pp. 51–58. doi: 10.1007/978-3-030-64961-6_4.

Abdelhak, S. *et al.* (2015) 'The role of institutions in alleviating the vulnerability of farmers to poverty in malaysia: A longitudinal study', *Kajian Malaysia*, 33, pp. 33–52. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84974735655&partnerID=40&md5=2f0b013406338dfe8ffa69e3108043eb>.

Abdul-Hakim, R., Abdul-Razak, N. A. and Ismail, R. (2010) 'Does social capital reduce poverty? A case study of rural households in Terengganu, Malaysia', *European Journal of Social Sciences*, 14(4), pp. 556–566. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77955074878&partnerID=40&md5=9068096003f994f9a5f4842f4c138e5f>.

Amat Simin, M. H., Abdullah, R. and Ibrahim, A. (2015) 'Influence of local leadership in poverty eradication among the Orang Asli communities in the state of Terengganu, Malaysia', *Asian Social Science*, 11(21), pp. 342–349. doi: 10.5539/ass.v11n21p342.

Asadullah, M. N., Joseph, J. and Chin, J. (2023) 'The Political Economy of Poverty Reduction in Malaysia', *Progress in Development Studies*, 23(2), pp. 127–151. doi: 10.1177/14649934231151486.

Daniel W, K. *et al.* (2022) 'Improving partnerships in rural communities: Organizing approaches for improved effectiveness and reach of rural nutrition programs', *Local Development and Society*, 3(2), pp. 204–221. doi: 10.1080/26883597.2021.1942166.

Fikri, R. *et al.* (2023) 'Technology Readiness of e-Government in the Use of Poverty Data for Social Assistance in Indonesia', in *Communications in Computer and Information Science*, pp. 195–202. doi: 10.1007/978-3-031-36001-5_25.



Kari, F. B. *et al.* (2016) 'Poverty within watershed and environmentally protected areas: the case of the indigenous community in Peninsular Malaysia', *Environmental Monitoring and Assessment*, 188(3), pp. 1–14. doi: 10.1007/s10661-016-5162-1.

Loganathan, T. *et al.* (2015) 'Household catastrophic healthcare expenditure and impoverishment due to rotavirus gastroenteritis requiring hospitalization in Malaysia', *PLoS ONE*, 10(5). doi: 10.1371/journal.pone.0125878.

Mohamad, N. A., Mat Desa, N. H. and Kasim, M. M. (2021) 'Development of Poverty Index for Districts in Kedah by Using CRITIC and Simple Additive Weighting Methods', *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(4), pp. 790–795. doi: 10.13189/ujaf.2021.090425.

Salamova, A., Kantemirova, M. and Makazieva, Z. (2023) 'Integrated approaches to poverty problems', in *E3S Web of Conferences*. doi: 10.1051/e3sconf/202345105016.

Schaaf, R. (2015) 'The rhetoric and reality of partnerships for international development', *Geography Compass*, 9(2), pp. 68–80. doi: 10.1111/gec3.12198.

Siong, H. C., Ngah, I. and Adeyemi, A.-A. I. (2011) 'Climate change and poverty in Malaysia: Challenges and prospects', *Regional Development Dialogue*, 32(2), pp. 66–80. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84860158800&partnerID=40&md5=3e67f15727027316a1a3bfabbea312fb>.

Siwar, C. (2014) 'Poverty Mapping and Characterizing the Poor Using Geographical Information System : Case Study in Terengganu , Malaysia', *Prosiding PERKEM*, 9, pp. 477–484.

Tedong, P. A. *et al.* (2022) 'RURAL RESIDENTS' PERCEPTIONS ON THE POVERTY ALLEVIATION AND GOVERNANCE IN SARAWAK, MALAYSIA', *International Journal of Business and Society*, 23(2), pp. 649–664. doi: 10.33736/IJBS.4831.2022.

Xiang, C. and Tan, M. (2019) 'Innovation mode and effective ways of realizing rural public management under accurate poverty alleviation', *Revista de Cercetare si Interventie Sociala*, 65, pp. 306–324. doi: 10.33788/rcis.65.19.

Zainudin, L. M. *et al.* (2019) 'Socio-economic profile comparison of fishermen community in Kuala Marang and Seberang Takir, Terengganu, Malaysia', *Journal of Sustainability Science and Management*, 14(6), pp. 145–157. Available at: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85077267077&partnerID=40&md5=2575e0d6aaeb1d3b7bd2c735035e4168>.

Zhang, X. *et al.* (2022) 'Paths out of poverty: Social entrepreneurship and sustainable development', *Frontiers in Psychology*, 13(November), pp. 1–13. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1062669.